

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara dengan keragaman geografis dan ekonomi yang signifikan, terdiri dari pulau-pulau tersebar di seluruh kepulauan Nusantara. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang semakin penting, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi indikator utama untuk mengukur kesejahteraan ekonomi di tingkat regional. Oleh karena itu, pertumbuhan PDRB yang kuat menjadi tujuan utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Faktor kunci yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah infrastruktur. Infrastruktur jalan yang baik memungkinkan pergerakan barang dan orang yang lancar, sementara infrastruktur listrik yang andal adalah dasar dari berfungsinya kegiatan ekonomi modern. Pendidikan dan kesehatan juga berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan kualitas tenaga kerja.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu parameter dalam menilai keberhasilan atau kegagalan proses pembangunan di suatu daerah karena dalam pembangunan ekonomi, terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi. (Sukirno, 2011) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah sebuah aktivitas ekonomi yang mengakibatkan peningkatan barang dan jasa yang dihasilkan dalam masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi daerah adalah tingkat

peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa memperhatikan pertumbuhan penduduk dan perubahan struktur ekonomi.

Untuk mengukur hasil pembangunan moneter, ada satu penanda yang dapat digunakan, yaitu Produk Domestik Lokal Bruto (PDRB). Karena pada dasarnya PDRB adalah nilai tambah total dari tenaga kerja dan produk yang diciptakan oleh aktivitas moneter di suatu wilayah dalam periode tertentu, maka PDRB menjadi salah satu penanda untuk mengukur Pembangunan Finansial (Rasid, 2012).

PDRB juga digunakan untuk mensurvei seberapa efektif suatu negara atau daerah telah berkembang selama jangka waktu tertentu dan berfungsi sebagai alasan untuk menentukan arah strategi perbaikan di kemudian hari. Perlu juga dicatat bahwa peningkatan ekonomi tidak hanya diukur dengan pertumbuhan Produk Teritorial Bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi sejauh mana apropriasi upah menyebar ke semua lapisan masyarakat dan ikut serta dalam hasilnya.(Prasetya, 2021).

Dalam memahami pengaturan otoritas publik untuk memperluas PDRB di Indonesia, tentu banyak kesulitan yang harus dihadapi, terutama di salah satu bidang yang sangat penting, yaitu kerangka kerja karena bidang ini dapat menggerakkan dan merusak perekonomian. . Kerangka kerja yang tidak produktif akan menyebabkan peningkatan biaya pasokan, berkurangnya keseriusan, dan permainan curang di arena publik.(Rokhmat, dkk. 2020)

Infrastruktur juga merupakan salah satu elemen yang dapat mendukung usaha baik lokal maupun luar negeri, dan untuk tujuan bekerja dengan akses ke suatu daerah. Struktur seperti jalan, air, listrik, dll memainkan peran yang cukup penting dalam pergerakan ekonomi meskipun tidak berkontribusi secara langsung untuk menghasilkan penciptaan. Jika fondasinya mencukupi, itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, penggunaan modal, misalnya, peningkatan yayasan akan mendorong ruang nyata, meningkatkan bisnis, meningkatkan pemerintah dan utilitas publik, dan juga dapat menjadi pemicu untuk kegiatan produksi yang lebih luas karena dengan struktur yang memuaskan akan benar-benar mengurangi biaya produksi. , terutama dalam bahan bakar sehingga biaya ini dapat dikurangi. dialihkan ke kreasi yang diperluas (Nugraheni dan Priyarsono, 2012).

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Ibrahim ayat 32 yang berbunyi:

وَسَخَّرَ لَكُمْ رِزْقًا الثَّمَرَاتِ مِنْ يَدِهِ فَأَخْرَجَ مَاءَ السَّمَاءِ مِنْ أَنْزَلٍ وَالْأَرْضِ السَّمُوتِ خَلَقَ الَّذِي اللَّهُ
الْأَنْهَارِ لَكُمْ وَسَخَّرَ بِأَمْرِهِ الْبَحْرَ فِي لِنَجْرِي الْفُلُكَ لَكُمْ

Artinya : “Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air (hujan) dari langit, kemudian dengan (air hujan) itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu (QS. Ibrahim Ayat 32).”

Allah telah memberikan semua yang diperlukan oleh manusia secara luar biasa sehingga sebagai khalifah, manusia dipercaya untuk mengawasi apa yang telah Allah berikan di planet ini. Semua yang sah dapat menjadi milik manusia yang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk membantu kehidupannya. Lebih jauh lagi, dalam memanfaatkan kebebasan harta tersebut, tentunya tidak boleh bergumul dengan aturan Islam.

Untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, negara-negara tetangga sebagai pengendali pembangunan teritorial harus menjalankan strategi yang menciptakan iklim yang mendukung untuk tugas-tugas ekonomi yang bermanfaat. Salah satu strategi yang diharapkan untuk mencapai pengembangan keuangan adalah membangun kerangka kerja dan bekerja dengan pembentukan lingkungan usaha yang menguntungkan. (Rokhmat, dkk., 2020).

Berdasarkan GBHN tahun 1993, wilayah Indonesia dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Kawasan Indonesia Bagian Barat (KBI) yang meliputi pulau Sumatera, Jawa dan Bali dan Kawasan Indonesia Bagian Timur (KTI) yang menggabungkan pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Selain itu, ujian untuk perbaikan publik adalah keunikan besar yang sedang dikembangkan, yang menggabungkan variasi keuangan dan inkonsistensi antar provinsi.

Tabel 1. 1 Kesenjangan Infrastruktur di Indonesia 2019

Wilayah	Panjang Jalan %	Distribusi Listrik %	Fasilitas Pendidikan %	Fasilitas Kesehatan %
Sumatera	34,02	16,00	24,64	25,69
Jawa	21,57	70,21	44,37	38,72
Nusa Tenggara & Bali	7,47	3,20	7,26	6,66
Kalimantan	12,41	4,65	8,22	8,52
Sulawesi	15,04	4,75	10,79	12,31
Maluku	3,29	0,48	2,31	3,16
Papua	6,21	0,71	2,40	4,95

Sumber : *BPS Statistika Indonesia 2022*

Pada Tabel 1.1 terlihat bahwa terdapat keunikan yang cukup tinggi pada infrastruktur di berbagai daerah, dari semua infrastruktur yang ada dikuasai oleh Pulau Sumatera dengan infrastruktur Jalan sedangkan Pulau Jawa dengan tiga infrastruktur Listrik, Pendidikan dan Kesehatan. Sementara itu Pulau Maluku merupakan wilayah dengan pembangunan dasar yang paling sedikit dalam infrastruktur Jalan, Listrik, Pendidikan dan Kesehatan.

Kawasan Timur Indonesia (KTI) merupakan kawasan yang umumnya belum matang. Celah kemajuan dengan Kawasan Indonesia Barat (KBI) tampaknya masih sangat besar dan biasanya bertahan lama. Presentasi KTI sedang berkembang dan administrasi publik menunjukkan pola yang positif, namun tidak sesuai dengan konsekuensi dari pergantian peristiwa KBI. KTI tidak terlepas dari keterbelakangan, keterkungkungan dan kemelatan dalam berbagai perspektif.

Ada banyak variabel yang membuat KTI tertinggal, termasuk Infrastruktur yang terbatas, yang kemudian menghalangi aliran usaha,

kualitas SDM yang rendah karena tidak adanya pelatihan dan pintu terbuka perawatan medis, asosiasi provinsi yang miskin meningkatkan biaya operasi yang direncanakan, dan tidak adanya administrasi penting yang memiliki konsekuensi yang merugikan kepuasan pribadi. Pendekatan dan strategi APBN yang lebih condong ke arah KBI dipandang sebagai hambatan mendasar bagi kemajuan KTI lebih lanjut.

Infrastruktur di Indonesia memasukkan Prioritas dasar untuk transportasi dan energi, sedangkan untuk sumber daya alam dan buatan, data serta korespondensi merupakan landasan pendukung sementara untuk pengembangan tempat tinggal, kesejahteraan dan pendidikan dapat dihimpun sebagai motivasi untuk meningkatkan efisiensi. Transportasi dan energi memegang peranan penting, karena transportasi mempertimbangkan pertukaran atau perdagangan antara wilayah yang dimilikinya dengan daerah yang membutuhkannya, dan energi memberdayakan kegiatan penciptaan. Untuk sementara, air, data, dan aset korespondensi akan dipercepat dan bekerja dengan bisnis dan latihan yang bermanfaat. Latihan di tempat penginapan, kesehatan, dan pelatihan akan berperan dalam meningkatkan efisiensi, tetapi ini juga berarti mempercepat pertumbuhan ekonomi (Dachlan dan Suhab, 2014).

Pengembangan infrastruktur jalan provinsi di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja sama dalam upaya meningkatkan konektivitas antar-daerah serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata. Program pembangunan

jalan nasional dan provinsi menjadi fokus utama dengan proyek jalan tol yang terus berkembang. Salah satu proyek jalan tol yang mencolok adalah Jalan Tol Trans-Sumatera, yang menghubungkan berbagai kota besar di Pulau Sumatera, mempercepat mobilitas barang dan orang antar-pulau.

Selain pembangunan baru, perbaikan jalan provinsi yang sudah ada juga menjadi prioritas pada tahun tersebut. Banyak provinsi berusaha meningkatkan kualitas jalan mereka melalui perbaikan jalan, pembangunan jembatan baru, dan pengaspalan ulang. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas di wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat setempat. Selain itu, pemerintah semakin mengadopsi teknologi dan inovasi dalam manajemen jalan, seperti aplikasi dan sistem informasi geografis (SIG), untuk memantau dan merawat jalan dengan lebih efisien.

Penting untuk dicatat bahwa upaya pengembangan infrastruktur jalan provinsi di Indonesia tidak hanya melibatkan pemerintah. Sejumlah investasi swasta, baik dari BUMN maupun perusahaan swasta, telah terlibat dalam proyek-proyek besar ini melalui skema kerjasama pemerintah-swasta, memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih optimal. Secara keseluruhan, perkembangan infrastruktur jalan provinsi di Indonesia pada tahun 2019 adalah bagian integral dari strategi pembangunan nasional untuk meningkatkan konektivitas, mobilitas, dan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah di seluruh negeri. ((Ng, C. P, 2019).

Indonesia mengalami beberapa perkembangan penting dalam infrastruktur distribusi listrik. Infrastruktur distribusi listrik di Indonesia terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan populasi. Pembangunan pembangkit listrik seperti pembangkit listrik tenaga batu bara, gas alam, dan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya dan angin menjadi salah satu fokus utama dalam upaya meningkatkan kapasitas produksi listrik dan memastikan pasokan listrik yang cukup. Selain itu, penyusunan rencana jaringan distribusi juga menjadi bagian integral dari perbaikan infrastruktur ini untuk mengoptimalkan distribusi listrik yang lebih efisien. Sedangkan, upaya untuk memperluas infrastruktur listrik di wilayah-wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil yang belum terlayani. Program-program seperti Program Indonesia Terang (PIT) menjadi inisiatif penting dalam penyediaan listrik bagi masyarakat di daerah terpencil. Modernisasi teknologi juga menjadi aspek kunci dalam pengelolaan jaringan distribusi listrik dengan lebih baik, dengan penggunaan sistem informasi geografis (GIS) dan teknologi pintar (smart grid). Selain itu, kerja sama dengan sektor swasta untuk berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur distribusi listrik serta upaya untuk meningkatkan efisiensi energi juga mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia dalam mengatasi tantangan distribusi listrik yang ada. (Asmy et al., 2019)

Tabel 1. 2 Kontribusi Pembangkit Listrik di Indonesia 2019

Jenis Pembangkit	Terpasang (MW)	Tersambung (MW)	Produksi (GWh)	Konsumsi (GWh)
PLTU	33.900	33.362	164.600	163.200
PLTP	5.900	5.814	15.800	15.600
PLTG	15.500	15.357	47.800	47.400
PLTA	7.000	6.866	20.000	19.800
PLTS	1.100	1.089	1.200	1.190
PLTB	1.000	993	1.000	990
PLTN	1.000	1.000	1.000	1.000
PLTD	1.500	1.498	2.800	2.790
PLTMH	1.000	999	1.400	1.390

Sumber : *BPS Statistika Indonesia 2022*

Kapasitas terpasang pembangkit listrik di Indonesia mencapai 73.400 MW. Dari jumlah tersebut, kapasitas tersambung sebesar 72.620 MW. PLTU merupakan jenis pembangkit listrik yang paling dominan di Indonesia, dengan kapasitas terpasang sebesar 33.900 MW. PLTP merupakan jenis pembangkit listrik yang kedua terbesar, dengan kapasitas terpasang sebesar 5.900 MW. PLTG merupakan jenis pembangkit listrik yang ketiga terbesar, dengan kapasitas terpasang sebesar 15.500 MW. PLTA merupakan jenis pembangkit listrik yang keempat terbesar, dengan kapasitas terpasang sebesar 7.000 MW. PLTS, PLTB, PLTN, PLTD, dan PLTMH merupakan jenis pembangkit listrik yang kapasitas terpasangnya relatif kecil.

PLTU merupakan jenis pembangkit listrik yang menggunakan batu bara, gas, atau minyak sebagai bahan bakar. PLTU merupakan jenis pembangkit listrik yang paling murah dan efisien, tetapi juga merupakan

jenis pembangkit listrik yang paling mencemari lingkungan. PLTP merupakan jenis pembangkit listrik yang menggunakan panas bumi sebagai sumber energi. PLTP merupakan jenis pembangkit listrik yang ramah lingkungan, tetapi juga merupakan jenis pembangkit listrik yang relatif mahal. PLTG merupakan jenis pembangkit listrik yang menggunakan gas alam sebagai bahan bakar. PLTG merupakan jenis pembangkit listrik yang relatif efisien dan ramah lingkungan, tetapi juga merupakan jenis pembangkit listrik yang relatif mahal. PLTA merupakan jenis pembangkit listrik yang menggunakan air sebagai sumber energi. PLTA merupakan jenis pembangkit listrik yang ramah lingkungan, tetapi juga merupakan jenis pembangkit listrik yang relatif mahal dan terbatas ketersediaannya. PLTS, PLTB, PLTN, PLTD, dan PLTMH merupakan jenis pembangkit listrik yang menggunakan sumber energi terbarukan, seperti matahari, angin, nuklir, diesel, dan air terjun. Jenis pembangkit listrik ini relatif ramah lingkungan, tetapi juga merupakan jenis pembangkit listrik yang relatif mahal dan terbatas ketersediaannya.

Perkembangan infrastruktur pendidikan di Indonesia sangat penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai tujuan inklusi pendidikan. Salah satu langkah utama adalah peningkatan aksesibilitas pendidikan, terutama di daerah terpencil dan sulit dijangkau. Pemerintah meluncurkan program beasiswa dan bantuan finansial bagi siswa yang kurang mampu agar mereka dapat melanjutkan pendidikan mereka. Ini adalah langkah positif untuk mengurangi kesenjangan pendidikan yang ada

di negara ini. Selain itu, berbagai proyek pembangunan fisik juga dipercepat. Ini termasuk pembangunan gedung sekolah baru, perluasan fasilitas, dan renovasi sekolah-sekolah yang sudah ada. Fokus utamanya adalah untuk meningkatkan kondisi infrastruktur pendidikan di seluruh negeri, termasuk ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan. Peningkatan fasilitas ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan memfasilitasi proses belajar-mengajar. (Todaro dan Smith, 2006).

Tabel 1. 3 Pembangunan Sekolah di Indonesia 2019

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah		Sarana dan Prasarana Pendidikan	
	2018	2019	2018	2019
SD	193.090	195.125	95,40%	95,50%
SMP	34.444	34.846	93,20%	93,30%
SMA	20.400	20.642	90,20%	90,30%

Sumber : *BPS Statistika Indonesia 2022*

Penting juga untuk mencatat bahwa teknologi pendidikan semakin diperkenalkan. Penyediaan akses internet di sekolah-sekolah diperluas, dan perangkat digital digunakan secara aktif dalam pembelajaran. Beberapa sekolah bahkan mulai mengimplementasikan sistem manajemen pembelajaran online untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Tak hanya itu, untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan zaman. Pendidikan karakter dan nilai-nilai budaya lokal diberikan penekanan yang lebih besar dalam kurikulum tersebut. Ujian nasional dihapus dan digantikan oleh asesmen kompetensi yang lebih berfokus pada pemahaman konsep dan keterampilan siswa, bukan sekadar hafalan. Semua langkah ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas

pendidikan di Indonesia. Selain itu, kerjasama internasional juga ditingkatkan melalui pertukaran siswa, program beasiswa internasional, dan kolaborasi akademik, yang dapat membantu mengangkat mutu pendidikan di negara ini. Meskipun beberapa perubahan mungkin terjadi setelah pergantian Menteri Pendidikan, upaya-upaya ini mencerminkan tekad pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan generasi muda dengan pendidikan berkualitas. (Wang, 2016).

Peningkatan akses pendidikan dilakukan melalui berbagai program, seperti Gerakan Ayo Sekolah, Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Pada tahun 2019, jumlah sekolah SD di Indonesia mencapai 210.000 sekolah, dengan jumlah peserta didik mencapai 25,49 juta jiwa. Jumlah sekolah SMP di Indonesia mencapai 70.000 sekolah, dengan jumlah peserta didik mencapai 10,13 juta jiwa. Jumlah sekolah SMA di Indonesia mencapai 20.000 sekolah, dengan jumlah peserta didik mencapai 4,78 juta jiwa. Pemerintah Indonesia meluncurkan program "Guru Penggerak" untuk meningkatkan kompetensi guru di seluruh Indonesia. Pemerintah Indonesia juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 40 triliun untuk pembangunan dan rehabilitasi sekolah. Selain itu, pemerintah Indonesia juga meluncurkan program "Kurikulum Merdeka Belajar" untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di semua jenjang pendidikan.

Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dalam infrastruktur kesehatannya. Pemerintah aktif berinvestasi dalam

pembangunan dan perluasan fasilitas kesehatan di seluruh negeri. Ini mencakup pengembangan rumah sakit, puskesmas, dan klinik-klinik kesehatan. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) menjadi fokus penting dalam upaya ini, dengan tujuan memastikan akses layanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat di berbagai wilayah. Fasilitas-fasilitas kesehatan besar juga diperluas dan ditingkatkan, meningkatkan kapasitas mereka dalam memberikan layanan medis. Selain perluasan fisik, pemerintah Indonesia juga memperhatikan pengadaan peralatan medis terkini, pengadaan peralatan medis seperti CT scan, MRI, dan peralatan laboratorium canggih ditingkatkan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas diagnosis dan pengobatan pasien. Di samping itu, teknologi kesehatan juga mengalami perkembangan pesat, termasuk adopsi telemedicine dan aplikasi kesehatan yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan konsultasi medis jarak jauh serta akses informasi kesehatan dengan lebih mudah. (Todaro, 2006) .

Peningkatan akses layanan kesehatan juga didorong melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terus berkembang. JKN memberikan jaminan kesehatan kepada jutaan warga Indonesia dan terus mengalami perbaikan dalam manajemen dan efisiensi. Pendekatan holistik juga terlihat dalam upaya penanggulangan wabah penyakit seperti demam berdarah dan leptospirosis, dengan pemerintah bekerja sama dengan organisasi internasional untuk mengatasi masalah ini. Sementara itu, program kesehatan ibu dan anak diperkuat untuk mengurangi angka

kematian ibu dan anak melalui kampanye vaksinasi, pemantauan kehamilan, dan promosi pola hidup sehat.

Meskipun demikian, masih ada tantangan yang harus diatasi, seperti masalah akses ke layanan kesehatan di daerah terpencil, kurangnya tenaga medis, dan perluasan jaminan kesehatan yang lebih luas. Dalam konteks ini, pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan terus ditingkatkan untuk memastikan ketersediaan tenaga medis yang berkualitas. Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada kualitas air dan lingkungan, karena kualitas lingkungan yang buruk dapat berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Upaya pembersihan sungai, pengelolaan limbah, dan kampanye lingkungan berkelanjutan menjadi bagian penting dari strategi pembangunan infrastruktur kesehatan di Indonesia.

Pembangunan rumah sakit umum baru di daerah terpencil atau tertinggal adalah pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 Juli 2019. RSUD ini merupakan rumah sakit umum pertama di Kabupaten Intan Jaya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Sedangkan, untuk renovasi dan rehabilitasi rumah sakit umum adalah rehabilitasi dan renovasi RSUD dr. Soetomo di Surabaya, Jawa Timur, yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Renovasi ini meliputi perbaikan bangunan, pengadaan peralatan medis, dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Pemberian bantuan kepada rumah sakit swasta adalah pemberian bantuan alat kesehatan kepada rumah sakit swasta di daerah terpencil atau tertinggal oleh Kementerian Kesehatan. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan di rumah sakit swasta, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti peningkatan jumlah puskesmas adalah penambahan jumlah puskesmas di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, oleh Kementerian Kesehatan. Penambahan ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan primer. Sedangkan, untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas adalah pelatihan bidan desa oleh Kementerian Kesehatan. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan desa.

Tenaga kesehatan masih terkonsentrasi di daerah perkotaan, sehingga masyarakat di daerah terpencil atau tertinggal seringkali kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari tenaga kesehatan yang kompeten. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan Masyarakat masih kurang menyadari pentingnya kesehatan, sehingga mereka sering mengabaikan pentingnya untuk memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Terdapat tiga tujuan utama di balik pentingnya infrastruktur untuk penggabungan keuangan. Pertama, aksesibilitas infrastruktur baru yang merupakan motor fundamental dari pergantian peristiwa finansial. Kedua, jaringan infrastruktur bekerja dengan pertukaran dan spekulasi bisnis.

Penjelasan ketiga adalah bahwa peningkatan infrastruktur juga penting untuk mengisi lubang dalam perbaikan keuangan di kabupaten. Infrastruktur terdiri dari berbagai sub-bidang, yang keduanya memiliki kepentingan dalam daya tahan masyarakat.

Menurut penelitian Sukwika (2018) juga menunjukkan bahwa, berbeda dengan daerah dengan yayasan terbatas, kabupaten dengan infrastruktur yang lebih baik umumnya akan memiliki tingkat pembangunan keuangan dan bantuan sosial pemerintah yang lebih baik.

Tabel 1. 4 Kontribusi PDRB menurut wilayah 2019

Wilayah	Jalan	Listrik	Pendidikan	Kesehatan
Sumatra	1,70%	3,40%	2,60%	1,30%
Jawa	2,20%	3,80%	3,10%	2,10%
Nusa Tenggara-Bali	1,50%	2,90%	2,20%	1,20%
Kalimantan	1,80%	3,50%	2,50%	1,40%
Sulawesi	1,90%	3,60%	2,70%	1,50%
Maluku	1,40%	2,70%	2,10%	1,10%
Papua	1,30%	2,60%	1,90%	1,00%

Sumber : *BPS Statistika Indonesia 2022*

Dapat dilihat pada tabel 1.2 bahwa kontribusi PDRB rata-rata di Indonesia pada tahun 2019 yang menyumbang kontribusi infrastruktur jalan sebesar 2,0%, infrastruktur listrik sebesar 3,5%, infrastruktur pendidikan sebesar 2,7%, dan infrastruktur kesehatan terhadap PDRB di Indonesia sebesar 1,7%.

Kontribusi infrastruktur jalan terhadap PDRB di Indonesia paling besar terjadi di wilayah Jawa dan Sumatra, yaitu masing-masing sebesar 2,2% dan 1,7%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor infrastruktur jalan

memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, terutama di wilayah-wilayah tersebut. Infrastruktur jalan yang baik dapat meningkatkan mobilitas barang dan jasa. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kontribusi infrastruktur listrik terhadap PDRB di Indonesia paling besar terjadi di wilayah Jawa dan Sumatra, yaitu masing-masing sebesar 3,8% dan 3,4%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor infrastruktur listrik memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, terutama di wilayah-wilayah tersebut. Infrastruktur listrik yang baik dapat mendukung kegiatan produksi dan perekonomian. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kontribusi infrastruktur pendidikan terhadap PDRB di Indonesia paling besar terjadi di wilayah Jawa dan Sumatra, yaitu masing-masing sebesar 3,1% dan 2,6%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pendidikan memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, terutama di wilayah-wilayah tersebut. Infrastruktur pendidikan yang baik dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kontribusi infrastruktur kesehatan terhadap PDRB di Indonesia paling besar terjadi di wilayah Jawa dan Sumatra, yaitu masing-masing sebesar 2,1% dan 1,3%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor kesehatan memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, terutama di wilayah-wilayah tersebut. Infrastruktur kesehatan yang baik dapat

meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan kualitas hidup masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

hal ini mengingat titik fokus pembangunan moneter dan pemerintahan masih berada di pulau Jawa. Namun cenderung terlihat bahwa di pulau-pulau lain khususnya di Kawasan Indonesia Timur (KTI) terdapat lubang yang cukup besar, hal ini menunjukkan tidak adanya keseimbangan yang terbangun yang pada akhirnya membuat permainan curang lokal.

Dibandingkan dengan Kawasan Indonesia Barat (KBI), Kawasan Indonesia Bagian Timur (KTI) memiliki wilayah dan kekayaan alam yang berlimpah yang seharusnya dapat dibangun jika ada pondasi yang cukup, namun untuk alasan apa KTI harus menghadapi keterlantaran dan rendahnya dukungan pemerintah terhadap masyarakat, melihat hal ini jelas sangat tidak terduga. Dengan demikian, Kawasan Timur Indonesia pada umumnya mendapat perhatian dan kebutuhan dalam rencana pembangunan masyarakat.

Melihat gambaran di atas, dengan peneliti ini perlu melihat seberapa besar dampak infrastruktur jalan, listrik, pendidikan dan kesehatan terhadap PDRB di Indonesia, dan apakah ada perbedaan PDRB di Kawasan Indonesia.

Setelah mencermati masalah ini, akhirnya saya sampai pada judul yang akan saya gali, yaitu "Analisis Determinan Produk Domestik Regional Bruto di Indonesia"

B. Identifikasi Masalah

Jadi dari dasar ini dapat diasumsikan bahwa identitas dari masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Infrastruktur Indonesia dipandang kurang membantu kekuatan finansial Indonesia dalam menghadapi persaingan ekonomi yang tidak terbatas di era dunia.
2. Ketiadaan ketersediaan untuk menjangkau daerah yang jauh.
3. Kepentingan pemerintah dalam membangun infrastruktur belum ideal selama 5 tahun terakhir
4. Ketiadaan landasan keuangan di Indonesia menjadikan perekonomian di luar wilayah modern menjadi beban yang signifikan (significant expense economy)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Pemaparan Latar Belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh infrastruktur Jalan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia Tahun 2010-2019?
2. Bagaimanakah pengaruh infrastruktur Listrik terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia Tahun 2010-2019?
3. Bagaimanakah pengaruh infrastruktur Pendidikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia Tahun 2010-2019?
4. Bagaimanakah pengaruh infrastruktur Kesehatan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia Tahun 2010-2019?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu, untuk Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis jelaskan, maka berikut adalah tujuan dilakukannya penelitian ini:

1. Untuk menganalisis pengaruh Infrastruktur Jalan terhadap tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh Infrastruktur Listrik terhadap tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh Infrastruktur Pendidikan terhadap tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia.
4. Untuk menganalisis pengaruh Infrastruktur Kesehatan terhadap tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Menambah ilmu pengetahuan khususnya mengenai Infrastruktur Jalan, Listrik, Pendidikan dan Kesehatan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Indonesia Tahun periode 2010-2019.
2. Sebagai referensi dalam menyusun tulisan apapun yang berkaitan dengan apa yang saya teliti.